P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

Samuka Vol 10 No 1 : hlm 34-47
SAMUKA
Jurnal Samudra Ekonomika
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA BERDASARKAN DATA SUSENAS

Langgeng Priasih[1], [2]Maulida Achsan, [3]Rahmalia Utami, [4]Shabira Rishyadi, [5]Apip Supriadi

Email: langgengpriasih@gmail.com
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Received: 30/11/2026; Accepted: 16/02/2026; Published: 27/03/2026

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama bagi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2023 dengan menggunakan data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan serangkaian uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel independen yang meliputi tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan PDRB per kapita, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif yang mendekati signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan berpotensi menurunkan kemiskinan. Secara simultan, model regresi signifikan, yang berarti ketiga variabel bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,178 menunjukkan bahwa sekitar 18% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti ketimpangan pendapatan, akses kesehatan, dan infrastruktur. Temuan ini memperkuat bahwa kemiskinan bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan kebijakan multidimensional yang terpadu.

Kata Kunci : Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama Sekolah, PDRB

INTRODUCTION

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang saat ini masih menjadi tantangan utama di banyak negara karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian, termasuk di Indonesia sendiri. Pada jangka pendek dan panjang, kemiskinan memotong akses masyarakat terhadap kesehatan, Pendidikan, dan pekerjaan layak, yang menghambat produktivitas negara serta memperlebar kesenjangan sosial. Secara makro, tingginya tingkat kemiskinan menurunkan daya beli, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan beban fiskal negara. Ketimpangan ini juga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik, yang berdampak negatif terhadap iklim investasi (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia 2023
Sumber: BPS, diolah

Menurut data dari BPS 2023, provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju, seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Sebaliknya, daerah-daerah di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih signifikan di Indonesia dan menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi yang beragam antarprovinsi turut menentukan tingkat kemiskinan (Purwanti, 2024).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan facto penting yang berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Ketika pengangguran tinggi, hal ini menunjukkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, sehingga berpengaruh langsung pada pendapatan keluarga dan memperbesar risiko kemiskinan. Sebuah penelitian yang dilakukan di daerah Pulau Jawa menunjukkan bahwa pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan (Wijayanti, 2025). Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam teori pasar tenaga kerja yang menyebutkan bahwa tingginya tingkat pengangguran akan memberikan dampak negatif yang besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia 2023
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, diketahui bahwa beberapa provinsi di Indonesia mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Provinsi seperti Aceh, beberapa daerah di pulau Sumatera, bahkan Banten dan DKI Jakarta masih menunjukkan persentase penduduk miskin yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menempel di wilayah dengan tingkat pembangunan rendah saja, tetapi juga ada di beberapa daerah dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi sekalipun. Sementara itu, terdapat beberapa provinsi yang berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, seperti Bali, Papua, dan Sulawesi Barat. Keberadaan

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

provinsi-provinsi tersebut sebagai wilayah dengan angka kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan adanya berbagai faktor sosial ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih kondusif dalam mengatasi kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan rata-rata lama sekolah juga menjadi aspek penting dalam membentuk peluang ekonomi masyarakat. Pendidikan rendah membatasi akses individu pada pekerjaan yang layak dengan upah memadai, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Lebih jauh, pendidikan yang lebih tinggi secara jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan (Purwanti, 2024). Hal ini didukung oleh analisis yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial (Setiawan et al., 2024).



Gambar 3. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Indonesia 2023
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 12,36 tahun, yang mencerminkan bahwa penduduknya secara umum mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Hal ini menunjukkan kualitas dan akses pendidikan yang relatif lebih baik di ibu kota dan sekitarnya. Sebaliknya, provinsi Papua memiliki rata-rata lama sekolah terendah, hanya sekitar 8,08 tahun, yang berarti rata-rata penduduknya hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bahkan lebih rendah. Perbedaan ini mencerminkan disparitas yang cukup besar dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan serta kesempatan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Kondisi tersebut menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap pemerataan pendidikan yang dapat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, di provinsi-provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang masih rendah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi indikator penting lainnya yang mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang tinggi seharusnya membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan PDRB yang tidak disertai distribusi pendapatan yang merata tidak otomatis menurunkan kemiskinan secara signifikan. Studi afirmatif di beberapa provinsi menunjukkan bahwa walaupun ada peningkatan PDRB, ketimpangan pendapatan seringkali tetap menyebabkan kemiskinan residual (Setiawan et al., 2024).



Gambar 4. PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia 2023
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta, yang mencerminkan posisi sebagai pusat ekonomi utama dengan kontribusi ekonomi terbesar di tingkat nasional. Provinsi lain yang juga mencatat PDRB tinggi adalah Kalimantan Timur, yang didukung oleh sektor pertambangan dan industri yang berkembang pesat. Di sisi lain, provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, dan Maluku mencatat PDRB yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan disparitas ekonomi yang signifikan antar daerah, di mana wilayah-wilayah tersebut menghadapi keterbatasan dalam hal pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada rendahnya kapasitas ekonomi mereka. Perbedaan tingkat PDRB antar provinsi tersebut menegaskan perlunya upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal agar kesenjangan ekonomi dapat dikurangi secara signifikan.

Mengingat kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, penting dilakukan analisis empiris yang mendalam terkait pengaruh berbagai faktor seperti tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per provinsi terhadap angka kemiskinan pada tahun 2023. Kajian semacam ini tidak hanya memberikan gambaran rinci tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan di setiap daerah, melainkan juga berfungsi sebagai alat penting bagi perumus kebijakan. Dengan memahami dinamika dan peran ketiga variabel tersebut secara lokal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.

TINJAUAN TEORI

1. Teori Pembangunan & Kemiskinan (Todaro & Smith, 2015)

Todaro dan Smith dalam bukunya Economic Development (2015) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga dari perubahan struktural yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pengurangan kemiskinan. Mereka menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kemiskinan harus dilihat sebagai masalah multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan institusional.

Dengan tujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan menurut mereka didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dengan kondisi nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang rendah sehingga menghambat

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

produktivitas dan kesejahteraan. Pembangunan yang inklusif harus mampu mengatasi akar akar ketimpangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Todaro & Smith, kemiskinan terjadi karena ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan ini agar kemiskinan dapat ditekan secara efektif.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan pembangunan ekonomi adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan struktural sosial, sikap masyarakat, dan institusi, dengan tujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan menurut mereka didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dengan kondisi nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang rendah sehingga menghambat produktivitas dan kesejahteraan. Pembangunan yang inklusif harus mampu mengatasi akar-akar ketimpangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

2. Konsep Garis Kemiskinan (BPS, 2023)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep garis kemiskinan sebagai batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Garis kemiskinan ini biasanya dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang diperlukan untuk memperoleh kalori minimum dan kebutuhan dasar lainnya. BPS mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs) yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan.

Komponen makanan didasarkan pada konsumsi minimal 2100 kilokalori per kapita per hari dengan komoditas umum seperti beras, telur, dan sayur. Komponen non-makanan meliputi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan berdasarkan data pengeluaran dan konsumsi rumah tangga yang dikumpulkan melalui Susenas, dan berbeda antar daerah mengikuti tingkat harga dan pola konsumsi masing-masing. Garis kemiskinan ini menjadi indikator utama untuk mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Pendekatan ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan.

3. Teori Human Capital (Schultz, Becker)

Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang menghasilkan "modal manusia" yang dapat meningkatkan kemampuan kerja dan inovasi. Dalam konteks kemiskinan, peningkatan modal manusia melalui pendidikan dapat menekan kemiskinan karena individu yang lebih terdidik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih tinggi.

a) Human Capital Theory (Schultz, 1961; Becker, 1964)

Teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan investasi penting yang meningkatkan produktivitas individu. Investasi ini bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan kualitas modal manusia yang didukung oleh peningkatan pendidikan dan kesehatan membuka peluang signifikan untuk keluar dari kemiskinan, sebab tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

b) Endogenous Growth Theory (Romer, 1986; Lucas, 1988)

Dalam teori pertumbuhan endogen, akumulasi modal manusia, inovasi, dan pengetahuan dipandang sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan berperan krusial dalam meningkatkan kapasitas inovasi individu dan kolektif, sehingga menstimulasi pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Berbeda dengan model pertumbuhan eksogen, teori ini menempatkan peran internal seperti sumber daya manusia sebagai kunci dalam proses pembangunan ekonomi.

c) Signaling Theory (Spence, 1973)

Menurut teori sinyal, pendidikan berfungsi sebagai indikator atau sinyal kualitas tenaga kerja kepada pasar. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi diasumsikan memiliki kemampuan dan produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan nyata, tetapi juga berperan dalam memposisikan individu untuk memperoleh upah yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik di pasar tenaga kerja.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi: Trickle Down Effect vs Growth Without Development

a) Trickle Down Effect (Kuznets, 1955)

Teori trickle down effect berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kelompok kaya atau sektor atas pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada kelompok bawah. Pada tahap awal, pertumbuhan cenderung memperlebar kesenjangan karena kelompok kaya lebih cepat mendapatkan keuntungan dari investasi maupun inovasi. Namun dalam jangka panjang, manfaat pertumbuhan diyakini akan “menetes ke bawah” melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, dan berkembangnya usaha kecil. Akan tetapi, teori ini mendapat banyak kritik karena dalam praktiknya pertumbuhan sering kali tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, ketimpangan justru semakin besar tanpa adanya kebijakan redistribusi yang efektif, misalnya melalui pajak progresif, subsidi pendidikan, atau program sosial.

b) Growth Without Development (Seers, 1969)

Konsep growth without development menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (GDP) belum tentu membawa perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Negara bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi jika tidak diiringi dengan pembangunan manusia seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pemerataan distribusi, maka kemiskinan dan kesenjangan tetap tinggi. Teori ini mengkritik pandangan yang terlalu berorientasi pada angka makro, dan menegaskan bahwa pembangunan sejati harus menekankan aspek sosial dan pemerataan, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel tersebut menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan memakai E-Views 12. Metode yang digunakan dalam memperkirakan kriteria interpretasi ialah model asumsi klasik dan regresi linear berganda. (Nurkurniana, 2016) menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda ini menggunakan rumus sebagai berikut**:**

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \epsilon_i$$

Keterangan:

Yi = Tingkat kemiskinan provinsi i (%)

β1X1i = Tingkat pengangguran terbuka provinsi i (%)

β2X2i = Rata-rata lama sekolah provinsi i (tahun)

β3X3i = PDRB per kapita provinsi i (juta rupiah)

β0 = Konstanta

ε = Error term

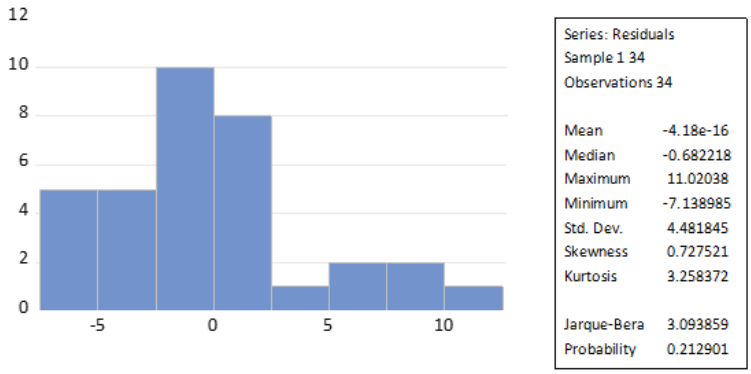
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah kesalahan prediksi atau selisih (disebut *residual*) antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model regresi kita mengikuti pola distribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas:



Gambar 5. Hasil Uji Normalitas
Sumber: EViews12

Berdasarkan output dari EViews, diperoleh bahwa nilai Prob. JB lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, tidak ada bukti statistik yang cukup untuk mengatakan bahwa residual model kita tidak normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terdapat korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Dalam konteks penelitian ini, masalah akan timbul jika, misalnya, variabel Tingkat Pengangguran (X_1) dan Rata-rata Lama Sekolah (X_2) memiliki hubungan linier yang sangat erat. Jika hal ini terjadi, model akan kesulitan untuk memisahkan pengaruh unik masing-masing variabel terhadap kemiskinan. Akibatnya, koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak stabil dan standar errornya membesar, sehingga mengaburkan signifikansi statistik dari masing-masing variabel. Berikut merupakan hasil uji Multikolinearitas:

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	84.82286	130.5225	NA
X1	0.441081	15.77473	1.326570
X2	1.451516	179.8226	1.802747
X3	7.63E-10	4.203096	1.478923

Gambar 6.. Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: EViews12

Semua nilai VIF ini jauh di bawah batas 10, bahkan di bawah batas konservatif 5. Ini artinya, tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model ini. Setiap variabel independen yaitu pengangguran, pendidikan, dan PDRB, yang mana memberikan kontribusi informasi yang unik dan dapat dibedakan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa koefisien yang diestimasi untuk masing-masing variabel benar-benar mencerminkan pengaruhnya sendiri, tanpa "terkontaminasi" oleh hubungannya dengan variabel lain.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual ini tidak konstan; misalnya, kesalahan prediksi cenderung lebih besar untuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan dengan yang rendah. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

F-statistic	0.856306	Prob. F(3,30)	0.4744
Obs*R-squared	2.681797	Prob. Chi-Square(3)	0.4433
Scaled explained SS	2.813978	Prob. Chi-Square(3)	0.4212

Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: EViews12

Output EViews untuk Uji Glejser menunjukkan nilai Prob. F sebesar 0.4744, jauh lebih besar dari 0,05, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti statistik untuk heteroskedastisitas dalam model ini. Asumsi homoskedastisitas terpenuhi, yang memperkuat keandalan dari nilai probabilitas (p-value) yang kita lihat pada uji-t dan uji-F.

d. Uji Autokorelasi

Dalam data *cross-sectional* seperti penelitian ini (di mana observasi adalah provinsi yang berbeda pada waktu yang sama), autokorelasi bisa terjadi jika ada pola spasial atau pengelompokan tertentu. Misalnya, jika provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

memiliki residual yang serupa (semuanya lebih tinggi atau lebih rendah dari prediksi model), maka autokorelasi mungkin terjadi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

F-statistic	0.291026	Prob. F(2,28)	0.7497
Obs*R-squared	0.692384	Prob. Chi-Square(2)	0.7074

Gambar 8. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber: EViews12

Uji ini menunjukkan nilai Prob. F sebesar 0.7497. Karena nilai ini jauh lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini. Ini memperkuat validitas model untuk menganalisis data cross-sectional provinsi-provinsi di Indonesia.

2. REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linier berganda adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini karena memiliki variabel independen yang berjumlah 2 variabel. Berikut hasil analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.39756	9.209933	3.517676	0.0014
X1	-0.527577	0.664139	-0.794378	0.4332
X2	-2.187644	1.204789	-1.815790	0.0794
X3	-7.14E-06	2.76E-05	-0.258376	0.7979

R-squared	0.252406	Mean dependent var	10.08912
Adjusted R-squared	0.177646	S.D. dependent var	5.183509
S.E. of regression	4.700599	Akaike info criterion	6.043388
Sum squared resid	662.8688	Schwarz criterion	6.222960
Log likelihood	-98.73759	Hannan-Quinn criter.	6.104627
F-statistic	3.376241	Durbin-Watson stat	1.512825
Prob(F-statistic)	0.031115		

Gambar 8. Hasil Regresi Linear Berganda
Sumber: EViews12

Berdasarkan tabel di atas didapatkan persamaan regresi linier berganda sesuai dengan rumus persamaan berikut yaitu:

$$\mathbf{Y = 32.39756 - 0.527577*X1 - 2.18764*X2 - 7.14e\text{-}06*X3}$$

a. Uji t (Parsial)

Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan adanya uji t ini maka dapat diketahui apakah terdapat perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan hasil perhitungan statistika, sehingga dapat diketahui diterima atau ditolaknya hipotesis. Adapun hasil dari Uji t yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. X1 (TPT): koef -0,528, Prob = 0,4332 > 0,05

2. X2 (Rata-rata Lama Sekolah): koef -2,188, Prob = 0,0794 > 0,05

3. X3 (PDRB per Kapita): koef -0,00000714, Prob = 0,7979 > 0,05

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X_1) memiliki koefisien sebesar -0,528 dengan nilai probabilitas 0,4332, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, variabel rata-rata lama sekolah (X_2) menunjukkan koefisien -2,188 dengan nilai probabilitas 0,0794, yang juga lebih besar dari 0,05. Meskipun demikian, nilai probabilitas ini mendekati batas signifikansi, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki kecenderungan memberikan pengaruh yang hampir signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah, kemungkinan tingkat kemiskinan akan menurun, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik.

Secara parsial, tidak satu pun dari ketiga variabel ini yang terbukti memiliki pengaruh statistik yang kuat terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat kepercayaan 95%. Namun, nilai probabilitas X_2 (0.0794) mendekati ambang batas, menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh yang "nyaris" signifikan.

b. Uji F (Simultan)

Uji ini bertuuan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersamaan (X_1, X_2, dan X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, uji ini memeriksa kelayakan model secara keseluruhan.

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 3,376 dengan probabilitas 0,031115, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen (X_1, X_2, dan X_3) secara bersama-sama membentuk model yang mampu menjelaskan variasi pada tingkat kemiskinan dengan makna statistik yang signifikan. Dengan demikian, meskipun secara parsial masing-masing variabel tidak berpengaruh signifikan, secara keseluruhan model penelitian ini tetap signifikan, yang berarti ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

c. Koefisien Determinasi

Uji ini digunakan untuk Mengukur seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) yang dapat dijelaskan oleh variasi dari semua variabel independen dalam model.

Dalam hasil penelitian nilai R-squared (R^2) = 0.252406. Artinya, sekitar 25,24% variasi tingkat kemiskinan antar provinsi dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah, dan PDRB per Kapita. Sedangkan nilai Adjusted R-squared = 0.177646: Nilai ini adalah penyempurnaan dari R^2 yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model. Nilainya, yaitu 17,76%, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kekuatan penjelas model, terutama ketika membandingkan model yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan, Variabel X1, X2, dan X3 hanya mampu menjelaskan sekitar 18–25% variasi kemiskinan antarprovinsi. Sisanya (±75–82%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model

B. PEMBAHASAN

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Secara statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%. Hasil ini menarik karena bertentangan dengan teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa pengangguran seharusnya berkontribusi positif terhadap kemiskinan melalui mekanisme hilangnya pendapatan. Adanya sektor informal yang besar di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, sehingga mereka yang secara statistik dikategorikan sebagai pengangguran tetap memiliki sumber pendapatan dari kegiatan ekonomi informal. Dukungan jaringan sosial dan keluarga dalam masyarakat Indonesia yang kuat dapat memberikan bantuan ekonomi kepada anggota keluarga yang menganggur, sehingga tidak langsung jatuh ke dalam kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil penelitian yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan Sari & Hadi (2021) yang menunjukkan bahwa pengaruh TPT tidak konsisten across different segments, sejalan dengan ketidaksignifikanan dalam penelitian.

2. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan

Meskipun Rata-Rata Lama Sekolah tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%, nilai probabilitas 0,0794 yang mendekati ambang batas 10% mengindikasikan adanya pengaruh yang hampir signifikan. Arah koefisien negatif sesuai dengan teori human capital yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi seharusnya mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan industri dapat mengurangi efektivitas pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil penelitian yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Santoso (2024) yang Menunjukkan adanya *threshold effect*, yang mungkin menjelaskan mengapa rata-rata lama sekolah secara umum tidak signifikan dalam model.

3. Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan

PDRB per kapita terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan kritik terhadap penggunaan PDRB sebagai indikator kesejahteraan dan mendukung argumen bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan. PDRB per kapita yang tinggi tidak menjamin distribusi yang merata, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tidak hanya itu, PDRB provinsi mungkin didominasi oleh sektor-sektor tertentu yang tidak menyerap banyak tenaga kerja atau tidak terkait langsung dengan pendapatan masyarakat miskin. Keterbatasan PDRB sebagai ukuran kesejahteraan, karena tidak mencakup aspek-aspek non-moneter yang penting bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil penelitian yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari & Hadi (2021) yang berpendapat bahwa PDRB tidak selalu efektif di daerah pedesaan. Hal ini Konsisten dengan ketidaksignifikanan PDRB dalam penelitian ini.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB per Kapita terhadap Kemiskinan

Secara simultan, ketiga variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan meskipun secara individual tidak ada yang signifikan. Hasil ini mengungkap

kompleksitas fenomena kemiskinan yang bersifat multidimensional. Ketiga faktor tersebut mungkin saling berinteraksi dalam mempengaruhi kemiskinan, dimana pengaruh satu variabel tergantung pada nilai variabel lainnya. meskipun model signifikan secara keseluruhan, rendahnya R^2 (25,24%) dan Adjusted R^2 (17,76%) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kemiskinan dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi yang terintegrasi dan simultan, bukan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Temuan ini mendukung pendekatan pembangunan yang inklusif yang mempertimbangkan berbagai dimensi secara bersamaan, termasuk dimensi sosial (pendidikan), ekonomi (pengangguran dan PDRB), serta faktor-faktor lain seperti distribusi pendapatan, akses kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil penelitian yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Nurhaliza (2024). Kesesuaian menekankan interaksi kompleks antar variabel, sejalan dengan signifikansi simultan namun tidak secara parsial.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap data lintas provinsi di Indonesia tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketiga variabel independen—tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan PDRB per kapita—tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5%. Namun demikian, rata-rata lama sekolah menunjukkan pengaruh negatif yang mendekati signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan rata-rata suatu provinsi cenderung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,031, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran, pendidikan, dan PDRB per kapita secara bersama-sama memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan antarprovinsi. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,252$) dan Adjusted R^2 (0,178) menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan sekitar 18–25% variasi kemiskinan, sementara mayoritas faktor yang memengaruhi kemiskinan sekitar 75–82% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti ketimpangan pendapatan, akses layanan kesehatan, kualitas infrastruktur, serta kebijakan sosial ekonomi daerah. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional sehingga tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui indikator ekonomi makro, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial, kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

P-ISSN 2685-4287
E-ISSN 2549-4104

REFERENSI

Adi, W. (2024). Health access and poverty dynamics in Indonesia. *Health Economics, 33*(4), 567–583.

Agus, Y. (2022). Agriculture, rural development, and poverty reduction in Indonesia. *Journal of Development Studies, 58*(3), 451–468.

Anisa, L. (2020). Determinants of household poverty in Indonesia: Evidence from Susenas microdata. *Economic Development Quarterly*, *34*(3), 210–222.

Astuti, M., et al. (2023). Poverty alleviation through economic growth: Indonesian Susenas insights. *Journal of Applied Econometrics, 38*(2), 234–248.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. **https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html**

Badan Pusat Statistik. (2023). *Garis kemiskinan Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS).

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.

Dewi, O., & Santoso, P. (2024). Education quality and poverty traps: Susenas panel study. *Journal of Development Economics, 167*, 103–119.

Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica*, *14*(2), 137–147.

Faisal, N. (2024). Labor market rigidities and poverty in Indonesia. *Labour Economics, 86*, 102–110.

Firman, A. (2023). Spatial analysis of poverty in Indonesia: Evidence from Susenas. *Papers in Regional Science*, *102*(2), 233–250.

Hakim, R., & Nurhaliza, T. (2024). Socioeconomic inequality and poverty in Indonesia: Susenas evidence. *Social Indicators Research, 172*, 1123–1140.

Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, *49*(193), 14–33.

Herlina, F. (2020). Trade openness, economic growth, and poverty in Indonesia. *Journal of International Trade & Economic Development*, *29*(8), 955–974.

Hidayat, T., & Lestari, M. (2021). Education, employment, and poverty: Susenas longitudinal analysis. *International Journal of Social Economics, 48*(6), 743–760.

Indah, C., & Pratiwi, D. (2020). Human capital and poverty reduction: Insights from Indonesian Susenas data. *International Journal of Educational Development, 78*, 102–110.

Karim, S., & Dewanti, R. (2021). Gender and poverty in Indonesia: Evidence from Susenas. *Feminist Economics, 27*(2), 134–150.

Kusuma, J., & Rahman, K. (2023). The role of education in mitigating poverty in Indonesia post-pandemic. *Economics of Education Review, 92*, 102–109.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review, 45*(1), 1–28.

Lestari, I. (2022). Regional disparities in poverty: Susenas data analysis for Indonesia. *World Development, 150*, 105–118.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3–42.

Mahendra, B. (2022). COVID-19 pandemic and poverty in Indonesia. *Asian Economic Papers, 21*(2), 101–120.

Melati, A. (2022). Digital divide and poverty in Indonesia. *Telecommunications Policy, 46*(5), 102–118.

Nugroho, E. (2021). Economic growth and poverty in Indonesia: Panel data from Susenas. *Regional Science and Urban Economics, 88*, 103–112.
Prabowo, D. (2023). Climate change, natural disasters, and poverty in Indonesia. *Ecological Economics, 204*, 107–125.
Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1-10.
Putra, H., et al. (2022). Unemployment, education, and poverty: An empirical study using Susenas. *Empirical Economics, 62*(4), 1567–1582.
Rahman, A., & Wijaya, S. (2019). Determinants of poverty in Indonesia: Evidence from Susenas data using panel regression. *Journal of Asian Economics, 65*, 101–115.
Rina, K. (2023). Financial inclusion and poverty reduction in Indonesia. *Journal of Financial Services Research, 64*(3), 301–320.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy, 94*(5), 1002–1037.
Rosita, E. (2024). Corruption, governance, and poverty in Indonesia. *Governance, 37*(1), 55–70.
Salim, K. (2021). Housing, living standards, and poverty in Indonesia. *Habitat International, 112*, 102–125.
Sari, F., & Hadi, G. (2021). Factors influencing rural poverty in Indonesia: Susenas evidence. *Journal of Rural Studies, 82*, 201–210.
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review, 51*(1), 1–17.
Seers, D. (1969). The meaning of development. *International Development Review, 11*(4), 2–6.
Setiawan, P. S., Muchtar, M., Sihombing, P. R. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161-171.
Silvia, V. (2023). Fiscal policy and poverty reduction in Indonesia. *Public Finance Review, 51*(1), 77–99.
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94.
Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355–374.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development. Pearson UK.
Wijayanti, D. (2025). Analisis Determinan Kemiskinan Sebuah Studi Empiris di Pulau Jawa Tahun 2019-2023. Jurnal Aplikasi Bisnis, 22(1).